

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN  
GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**ROBI MAULANA M., SE., MM  
(Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No. 311 Majalengka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data hasil kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka sebanyak 50 orang. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, dan observasi.

Rancangan analisis data yang digunakan adalah analisis kuesioner yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis koefisien regresi ganda. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F.

Berdasarkan hasil penelitian, Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.

Kata Kunci :Standar Akuntansi Pemerintahan,*Good Governancedan* Akuntabilitas Keuangan

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacarapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepadamasyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihanekonomi

Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan

penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Dari perkembangan di atas, menuntut perubahan peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang sebagai mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat, harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK). SAP ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Jamason Sinaga dalam Elvira Zeyn, 2010).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Indrawati Yuhertina dalam Elvira Zeyn (2010) menyebutkan "Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah". Akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan

keuangan atas pelaksanaan keuangan daerah.

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka ingin mencapai akuntabilitas keuangan yang baik. Tetapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Hal ini berarti akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka masih kurang mencapai hasil yang maksimal karena meskipun secara keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka bersifat wajar, tetapi masih ada beberapa hal yang dianggap tidak wajar menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk terciptanya akuntabilitas keuangan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari dukungan akuntabilitas keuangan seluruh komponen yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan salah satunya adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka yang merupakan objek dari penelitian ini.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan meneliti Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.

### 1.1 Perumusan Masalah

berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat merumuskan

masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan baik secara parsial maupun simultan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan baik secara parsial maupun simultan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan KH. Abdul Halim Nomor 311 Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411 Telepon (0233) 8286543. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### Kajian Pustaka

#### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan

persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP KK : 2010).

Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrua dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua. SAP Berbasis Akrua terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis

Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetaharus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

### **Konsep *Good Governance***

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc.*” Atau dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya” (Hetifah : 2009)

Sedangkan istilah “keperintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*” yang berarti “tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan

(proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Hetifah (2009) bahwa : *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, dan lain-lain. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

*Governance* merupakan terminologi yang digunakan menggantikan istilah *government*, menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator, dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama *governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. *Governance* berarti proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.

Hetifah (2009) mengartikan “*governance* sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah politik.” Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan

infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Definisi *governance* menurut Bank Dunia adalah “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development*”. Berikutnya adalah Asian Development Bank (ADB), yang sejak tahun 1995 telah memiliki *policy paper* bertajuk *Governance: Sound Development Management*. Kebijakan ADB mengartikulasikan empat elemen esensial dari *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*.

Definisi lain menyebutkan “*governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif,” (Meuthia, 2000). Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.

OECD dan World Bank mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Kooiman dalam Hetifah (2009) mengemukakan: *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan

masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.

Sedarmayanti (2009) mengemukakan arti *Good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsi dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pemerintahan yang baik tergantung pada dua hal:
  - 1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya seperti: legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan rakyat; akuntabilitas.
  - 2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara.

*United Nations Development Programme* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion integrations, and ensure the well being of their population*” yang artinya pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk

mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohevisitas sosial dalam masyarakat.

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

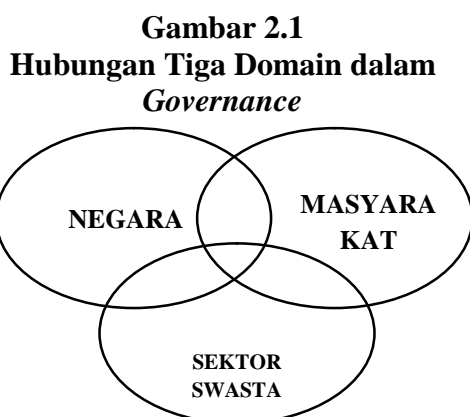
1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (2000) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa: *Good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berikut ini hubungan tiga domain dalam *governance*:



Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, yang merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlakukan langkah kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

### **Akuntabilitas Keuangan**

Pengertian akuntabilitas Menurut KK SAP (2005): "Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik."

Sementara Sadjiarto (2000) berpendapat bahwa: Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi hubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa: Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dan publik.

Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan menurut LAN, 2001 dalam Malik Imron (2005) mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. "Laporan keuangan pemerintah daerah

disajikan secara komprehensif," (Mardiasmo, 2009).

*Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negarayang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Anondo (2004) berpendapat bahwa :Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (LPJ keuangan daerah) dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah (LPJ kinerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap atas akuntabilitas publik pemerintah daerah dan penerapan IPSAS berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah.

### **Kerangka Pemikiran**

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. "Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik" (Sadjiarto, 2000). Dengan terciptanya ke pemerintahan yang baik (*good governance*) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah



dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian (a) *good governance* yang tinggi akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, (b) Standar Akuntansi Pemerintahan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, (c) penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tinggi akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Menurut PP No, 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi adalah:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

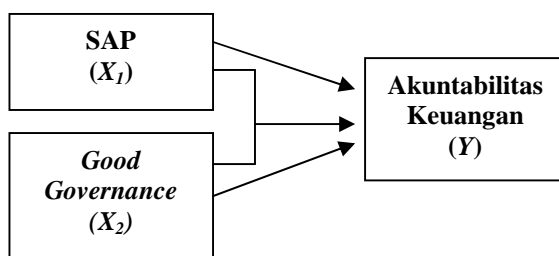
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009), prinsip utama unsur *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*accountability*)
2. Transparansi (*transparency*)
3. Partisipasi (*participation*)
4. Supremasi hukum aparat birokrasi

Standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka seperti pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**



## Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan baik secara parsial maupun simultan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.

## III. METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan menggunakan analisis metode deskriptif dan verifikatif.

### Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan rumusan masalah di atas, variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah” (PP No. 71 Tahun 2010).
2. *Good governance* sebagai variabel independen merupakan “penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat” (Lembaga Administrasi Negara, 2000).
3. Akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen merupakan “pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi” (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas keuangan ini sangat

penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka yang berjumlah 50 orang. Sedangkan sampel yang digunakan sampel jenuh yaitu populasi sama dengan sampel.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan arsip-arsip perusahaan yang sekiranya dapat dijadikan acuan dalam penelitian.

Prosedur pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi dan angket.

### Pengujian Instrumen Penelitian

Dalam pengujian instrument penelitian peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas sehingga data tersebut valid dan dapat dipercaya.

### Rancangan Analisis Data

Rancangan analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji F).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Koefisien Korelasi

#### Koefisien Korelasi Sederhana

Pengujian korelasi antar variabel digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui gubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana salah satu variabel independennya dibuat tetap/dikendalikan. Jadi korelasi antar variabel merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap/dikendalikan.

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi atau hubungan antar variabel.

**Tabel 4.1**  
**Korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance dengan Akuntabilitas Keuangan**  
**Correlations**

		S AP	Good Governance	Akuntabilitas Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	1	.509**	.618**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000
	N	50	50	50
Good Governance	Pearson Correlation	.509**	1	.409**
	Sig. (2-tailed)	.002		.003
	N	50	50	50
Akuntabilitas Keuangan	Pearson Correlation	.618**	.409**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	
	N	50	50	50

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, koefisien korelasi standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan sebesar 0,618 dan bertanda positif. Artinya keeratan hubungan antara

standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan adalah masuk kategori kuat dan mempunyai arah yang sama, sehingga semakin tinggi diterapkannya standar akuntansi pemerintahan maka akuntabilitas keuangan akan tinggi. Sebaliknya semakin rendah diterapkannya standar akuntansi pemerintahan maka akuntabilitas keuangan akan rendah pula.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, koefisien korelasi good governance dengan akuntabilitas keuangan sebesar 0,409 dan bertanda positif. Artinya keeratan hubungan antara good governance dengan akuntabilitas keuangan adalah masuk kategori sedang dan mempunyai arah yang sama, sehingga semakin tinggi diterapkannya good governance maka akuntabilitas keuangan akan tinggi. Sebaliknya semakin rendah diterapkannya good governance maka akuntabilitas keuangan akan rendah pula.

### Koefisien Korelasi Ganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dan good governance dengan akuntabilitas keuangan secara simultan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. Berikut adalah hasil perhitungan korelasi antara standar akuntansi pemerintahan dan good governance dengan akuntabilitas keuangan secara simultan.

**Tabel 4.2**

### Korelasi Antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* dengan Akuntabilitas Keuangan secara Simultan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 <sup>a</sup>	.411	.386	.94449

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, koefisien korelasi standar akuntansi pemerintahan dan good governance dengan akuntabilitas keuangan secara simultan sebesar 0,641 dan bertanda positif. Artinya keeratan hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dan good governance dengan akuntabilitas keuangan secara simultan adalah masuk kategori kuat dan mempunyai arah yang sama, sehingga semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance secara simultan, maka akuntabilitas keuangan akan tinggi. Sebaliknya semakin rendah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance secara simultan maka akuntabilitas keuangan akan rendah pula.

### Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Riduwan (2010), koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y.

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi variabel-variabel hasil penelitian :

- 1) Besarnya kontribusi pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan adalah sebesar 38,20%.
- 2) Besarnya kontribusi pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 16,70%.
- 3) Besarnya kontribusi Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governanc* terhadap Akuntabilitas Keuangan secara simultan atau bersama-sama adalah sebesar 41,10%, sedangkan sisanya sebesar 58,90% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian atau yang tidak diteliti.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji t

Dalam uji secara individual ini ingin diketahui hipotesis “apakah terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan *good governanc* terhadap akuntabilitas

keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka”.

Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,452 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,099. Dengan demikian nilai  $t_{hitung}$  (5,452) >  $t_{tabel}$  (2,099) sehingga  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan.

Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,107 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,099. Dengan demikian nilai  $t_{hitung}$  (3,107) >  $t_{tabel}$  (2,099) sehingga  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

### Uji F

Dalam uji secara simultan ini ingin diketahui hipotesis “apakah terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka”.

**Tabel 4.3**

### Uji Hipotesis Secara Simultan Variabel Y atas $X_1$ dan $X_2$

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.293	2	14.646	16.419	.000 <sup>a</sup>
	Residual	41.927	47	.892		
	Total	71.220	49			

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Data diolah

Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,419 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,195. Dengan demikian nilai  $F_{hitung}$  (16,419) >  $F_{tabel}$  (3,195) sehingga  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

### Pembahasan

#### Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) hasilnya menunjukkan nilai sebesar 0,618, artinya arah korelasi antara variabel standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan adalah positif (makin tinggi nilai standar akuntansi pemerintahan, makin tinggi nilai akuntabilitas keuangan). Dengan melihat nilai tingkat keeratan hubungan kuat, jika penerapan standar akuntansi pemerintahan baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Perhitungan koefisien determinasinya adalah sebesar 38,20% yang berarti akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel standar akuntansi pemerintahan dan sisanya 61,80% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Pada perhitungan uji t, hasil untuk variabel  $X_1$  (standar akuntansi pemerintahan) adalah sebesar 5,452 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. dikarenakan  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $t_{tabel}$  (5,452 > 2,099) dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar pegawai menilai standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Majalengka adalah baik (dengan perolehan skor 2224). Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

### **Pengaruh Good Governanceterhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) hasilnya menunjukkan nilai sebesar 0,409, artinya arah korelasi antara variabel *good governance* dengan akuntabilitas keuangan adalah positif (makin tinggi nilai *good governance*, makin tinggi nilai akuntabilitas keuangan). Dengan melihat nilai tingkat keeratan hubungan sedang, jika penerapan *good governance* cukup baik, maka akan cukup meningkatkan akuntabilitas keuangan. Pehitungan koefisien determinasinya adalah sebesar 16,70% yang berarti akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel *good governance* dan sisanya 83,30% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Pada perhitungan uji t, hasil untuk variabel  $X_2$  (*good governance*) adalah sebesar 3,107 dengan taraf signifikan sebesar 0,003. dikarenakan  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,107 > 2,009$ ) dengan taraf signifikan  $0,003 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar pegawai menilai *good governance* yang diterapkan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka adalah baik (dengan perolehan skor 2191). Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

**Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good**

### **Governanceterhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) hasilnya menunjukkan nilai sebesar 0,641, artinya arah korelasi antara variabel standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan adalah positif (makin tinggi nilai standar akuntansi pemerintahan dan *good governance*, makin tinggi nilai akuntabilitas keuangan). Dengan melihat nilai tingkat keeratan hubungan kuat, jika penerapan standar akuntansi pemerintahan *good governance* baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Pehitungan koefisien determinasinya adalah sebesar 41,10% yang berarti akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* dan sisanya 58,90% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Pada perhitungan uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,419 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,195 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. dikarenakan  $F_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $16,419 > 3,195$ ) dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar pegawai menilai standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* yang diterapkan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka adalah baik. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan diolah dalam bab sebelumnya dalam membahas identifikasi masalah yang dikemukakan, maka penulis menyimpulkan :

1. Nilai korelasi atau hubungan antara standar akuntansi pemerintahan ( $X_1$ ) dengan akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar 0,618, hal ini menunjukkan bahwa hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan berada dalam tingkat hubungan kuat. Sedangkan perolehan jumlah untuk koefisien determinasinya (KD) adalah sebesar 38,20% yang berarti akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel standar akuntansi pemerintahan dan sisanya 61,80% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya diperoleh  $t_{hitung}(5,452)$  lebih besar dari  $t_{tabel}(2,009)$  dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
2. Nilai korelasi atau hubungan antara *good governance* ( $X_2$ ) dengan akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar 0,409, hal ini menunjukkan bahwa hubungan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan berada dalam tingkat hubungan sedang. Sedangkan perolehan jumlah untuk koefisien determinasinya (KD) adalah sebesar 16,70% yang berarti akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel *good governance* dan sisanya 83,30% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya diperoleh  $t_{hitung}(3,107)$  lebih besar dari  $t_{tabel}(2,009)$  dengan taraf signifikan  $0,003 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

3. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi atau hubungan antara standar akuntansi pemerintahan ( $X_1$ ) dan *good governance* ( $X_2$ ) dengan akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar 0,641, hal ini menunjukkan bahwa hubungan standar akuntansi pemerintahan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan berada dalam tingkat hubungan kuat. Sedangkan perolehan jumlah untuk koefisien determinasinya (KD) adalah sebesar 41,10% yang berarti akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* dan sisanya 58,90% tersebut dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diteliti. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya diperoleh  $F_{hitung}(16,419)$  lebih besar dari  $F_{tabel}(3,195)$  dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan memiliki hubungan yang kuat, sehingga standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat baik untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, oleh karena itu sebaiknya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka lebih mengoptimalkan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia, misalnya dengan mengadakan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Berdasarkan hasil penelitian hubungan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan memiliki hubungan yang cukup (sedang). Dari hasil penelitian tersebut, terdapat dimensi yang memiliki nilai terendah yaitu dimensi partisipasi (*Participation*). Oleh karena itu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka hendaknya lebih meningkatkan tingkat partisipasi kepada para pegawai, pers, ataupun masyarakat, yaitu dengan mengikutsertakan pers dan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada, dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, sebaliknya memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas.
3. Berdasarkan hasil penelitian hubungan standar akuntansi pemerintahan dan

*good governance* dengan akuntabilitas keuangan memiliki hubungan yang kuat, sehingga standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* memiliki pengaruh yang sangat baik untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, untuk indikator-indikator baik dari segi standar akuntansi pemerintahan maupun *good governance* dengan nilai terendah, sebaiknya terus dioptimalkan untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang baik karena akuntabilitas keuangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anondo Daru. 2004. *Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Arja Sadjiarto. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 2, 138-150.
- Budi Mulyana. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1.
- Dedi Kurmayadi. 2008. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Good Governance (Survei pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)*
- Elvira Zeyn. 2010. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1 21-37.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- LAN, BPKP. 2001. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Keuangan*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Alfabeta. Bandung
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta. Jakarta.